

**PERSPEKTIF GENDER: PERSEPSI DAMPAK PENGADAAN TANAH
BERDASARKAN TEORI HIERARKI KEBUTUHAN MASLOW
(STUDI KASUS : KALURAHAN MARGOKATON, KAPANEWON SEYEGAN,
KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH :
VIOLINA CINDY SIVANIA
NIT. 22314217

**KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

The Yogyakarta–Bawen Toll Road, one of Indonesia's National Strategic Projects, has affected communities both directly and indirectly. This study aims to analyze the perspectives of men and women on the impacts of land acquisition based on Maslow's Hierarchy of Needs. A mixed methods approach was employed by combining quantitative and qualitative methods. Quantitative data were collected through questionnaires distributed to 60 respondents (30 men and 30 women) and analyzed using the Mann–Whitney U test. Qualitative data were obtained through in-depth interviews with affected communities, village officials, hamlet heads, and source triangulation.

The findings show no significant difference between male and female perceptions across the five dimensions of Maslow's hierarchy of needs. The impacts of land acquisition were mainly perceived as shared experiences, including dust, road damage, noise, health disturbances, changes in road access, and irrigation disruption. Qualitative findings confirmed that these impacts were experienced collectively regardless of gender. The study concludes that the impacts of land acquisition in Kalurahan Margokaton are perceived more as collective community experiences than gender-based differences. The mixed methods approach and Maslow's theory provide a comprehensive understanding of community perspectives on land acquisition.

Keywords: *gender perspective, land acquisition, Maslow's hierarchy of needs, mixed methods, Yogyakarta–Bawen Toll Road.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis.....	15
C. Kerangka Pemikiran.....	22
D. Hipotesis Penelitian	24
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN	25
A. Format Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Populasi dan Sampel	26
D. Definisi Operasional	28
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	51
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
A. Letak Geografis dan Batas Administratif.....	51
B. Kondisi Demografi.....	53

C. Responden Penelitian.....	54
D. Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol di Kalurahan Margokaton.....	55
BAB V	58
HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Perspektif Laki-laki dan Perempuan terhadap Dampak Pengadaan Tanah.....	58
B. Perubahan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Akibat Pengadaan Tanah	80
BAB VI.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, salah satu permasalahan yang masih akan dihadapi oleh negara berkembang yaitu kurang meratanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan berbagai program strategis yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Jalan tol diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024, dalam peraturan tersebut Jalan tol didefinisikan dengan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Pembangunan Infrastruktur untuk jalan tol tidak terlepas dari kegiatan pengadaan tanah. Terbatasnya lahan bebas ataupun tanah negara menyebabkan proses pembangunan tidak akan terlepas dari kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Dimana Negara mengambil alih tanah Masyarakat /tanah pribadi untuk kepentingan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, jika kepemilikan tanah oleh individu bertentangan dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum harus diprioritaskan (Zakie, 2013). Pemerintah memiliki hak untuk memperoleh tanah untuk kepentingan umum, namun harus menghormati hak-hak masyarakat dan warga negara (Sitorus & Limbong, 2004).

Oleh karena itu, pemerintah mengatur proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan pengadaan tanah memiliki berbagai dampak pada masyarakat, baik bagi mereka yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.

Pengadaan tanah merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan proyek jalan tol, karena menyangkut hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat. Dalam praktiknya, pengadaan tanah tidak jarang menimbulkan permasalahan seperti relokasi paksa, konflik ganti rugi, hilangnya mata pencaharian, dan perubahan lingkungan sosial masyarakat setempat. Proses ini tidak hanya berdampak secara fisik terhadap kepemilikan atau penggunaan tanah, tetapi juga berdampak secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Dampak tersebut dapat memengaruhi kemampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka secara menyeluruh.

Studi mengenai dampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik dari segi sosial maupun lingkungan. Dalam studi dampak social, beberapa pendekatan yang umum digunakan misalnya *Sustainable Livelihood (SL)*, *Involuntarily Resettlement and Relocation (IRR)*, *Livelihood Vulnerability (LV)*, maupun melalui framework yang umum digunakan dalam praktik pengadaan tanah, *Social Impacts Assessment (SIA)*. Meskipun setiap pendekatan memiliki kerangka tersendiri dalam mendefinisikan dampak sosial pengadaan tanah dan masing-masing memiliki penekanan yang berbeda, mereka memiliki kesamaan dalam melihat sejauh mana aktivitas pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur tersebut berpengaruh dalam mengubah pola kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial-budaya, maupun hubungan manusia – tanah dan ekosistem didalamnya. Selain beberapa pilihan diatas Teori Hierarki Kebutuhan Maslow juga dapat digunakan untuk mendefinisikan perubahan pola interaksi manusia – tanah – lingkungan. Hal ini pernah dilakukan oleh Jyoti Rao 2019, yang meneliti tentang bagaimana hubungan manusia dengan tanah dikontekskan dalam kebutuhan dasar manusia.

Selain beberapa pilihan diatas Teori Hierarki Kebutuhan Maslow juga dapat digunakan untuk mendefinisikan perubahan pola interaksi manusia - tanah – lingkungan. Hal ini pernah dilakukan oleh Jyoti Rao 2019,

yang meneliti tentang bagaimana hubungan manusia dengan tanah dikontekskan dalam kebutuhan dasar manusia.

Menurut Abraham Maslow (1943), kebutuhan manusia terbagi dalam lima tingkatan: kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan), kebutuhan keamanan (keamanan fisik dan ekonomi), kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki (relasi sosial), kebutuhan akan penghargaan (status sosial, martabat), dan kebutuhan aktualisasi diri (pengembangan potensi). Kebutuhan ini disusun secara hierarkis, artinya kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu mampu mengejar kebutuhan yang lebih tinggi (A. Maslow, 1943).

Dalam konteks pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur, adanya intervensi (pengadaan tanah dan berubahnya struktur fisik maupun non-fisik tanah sebagai akibat dari pengadaan tanah) akan mengubah pola interaksi manusia – tanah dan juga berpotensi mengonfigurasi ulang hierarki kebutuhan manusia (dalam konteks tanah) sebagaimana dijelaskan oleh Maslow. Hal ini dapat terjadi karena hubungan manusia dengan tanah tidak hanya secara material, tapi juga sosial, psikologis dan budaya.

Tanah, dalam konteks masyarakat lokal, tidak hanya berperan sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pada hampir semua tingkat dalam teori Maslow. Kebutuhan fisiologis dipenuhi melalui tanah sebagai tempat tinggal dan sumber pangan. Kebutuhan keamanan tercermin dalam rasa aman memiliki tempat tinggal yang tetap serta penghasilan yang stabil dari aktivitas pertanian atau usaha yang berbasis lahan. Kebutuhan sosial terpenuhi karena tanah menjadi bagian dari komunitas sosial, tempat seseorang berinteraksi dan menjalin hubungan sosial. Bahkan, penghargaan dan aktualisasi diri dapat dicapai melalui kepemilikan tanah yang dihormati masyarakat dan sebagai sarana untuk menjalankan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, kehilangan tanah atau pemindahan paksa akibat pengadaan tanah untuk jalan tol dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia secara menyeluruh.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak pengadaan tanah tidak dirasakan secara seragam oleh setiap individu, karena adanya perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan peran gender dalam masyarakat. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memahami dan merespons dampak pengadaan tanah menjadi penting untuk dianalisis. Sebagai contoh, laki-laki cenderung memiliki posisi sebagai kepala keluarga atau pemegang hak atas tanah dalam sistem patriarki, sehingga kehilangan tanah bisa dimaknai sebagai kehilangan kontrol atas sumber ekonomi dan status sosialnya, dan di sisi lain perempuan seringkali tidak secara formal tercatat sebagai pemilik tanah, namun memiliki keterikatan kuat terhadap tanah sebagai ruang produksi (kebun, ladang), pengelolaan domestik, serta ruang sosial yang menopang peran mereka dalam keluarga dan komunitas (Agarwal, 1994). Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa perempuan sering kali mengalami dampak yang lebih kompleks dari pengadaan tanah, karena selain menghadapi kehilangan aset ekonomi, mereka juga harus menanggung beban ganda dalam menjaga stabilitas rumah tangga, mengelola keuangan, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru pasca relokasi (Elmhirst, 2011). Meski demikian, dalam banyak kasus, suara perempuan sering kali tidak terdengar dalam proses konsultasi atau pengambilan keputusan terkait pengadaan tanah. Akibatnya, kebijakan pengadaan tanah cenderung tidak sensitif terhadap kebutuhan dan pengalaman spesifik perempuan. Dalam konteks internal keluarga Perempuan juga seringkali tidak memiliki suara yang sama dalam hal bagaimana kompensasi Ganti kerugian akan digunakan atau dibagikan, termasuk juga dalam menentukan masa depan setelah pengadaan tanah dilakukan (Shen dkk., 2024). Demikian halnya dengan dampak pengadaan tanah akan dirasakan berbeda berdasarkan gender (Salcedo-La Viña, 2019)(Levien, 2017).

Berangkat dari beragamnya dampak pengadaan tanah dan perspektif gender, penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi laki-laki dan perempuan secara terpisah dan mendalam terhadap dampak pengadaan

tanah, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup berdasarkan Teori Maslow. Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen Tahap II (pelebaran) sebagai studi kasus dipilih karena proyek ini melintasi berbagai wilayah pedesaan dan perkotaan, sehingga dapat menunjukkan variasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan latar belakang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Perspektif Gender: Persepsi Dampak Pengadaan Tanah Berdasarkan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (Studi Kalurahan Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi laki-laki dan perempuan terhadap dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, dilihat dari teori kebutuhan dasar Maslow terhadap pemenuhan kebutuhan hidup?
2. Apa saja bentuk perubahan pemenuhan kebutuhan hidup yang muncul akibat Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen jika ditinjau dari perspektif laki-laki dan perempuan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi persepsi laki-laki dan perempuan terhadap dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dari sisi perikehidupan (dampak sosial).
- b. Menganalisis perbedaan persepsi tersebut berdampak pada perikehidupan sosial mereka, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup dasar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

a. Manfaat Akademis

- 1) Memberikan kontribusi pada pengembangan teori Maslow dalam konteks pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap masyarakat.
- 2) Menambah literatur akademik tentang hubungan antara gender dan pengadaan tanah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi masukan bagi pemerintah dan pelaksana proyek agar lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat berdasarkan gender.
- 2) Memberikan rekomendasi kebijakan pengadaan tanah yang lebih adil dan inklusif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perspektif gender terhadap dampak pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen di Kalurahan Margokaton, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif menggunakan uji Mann–Whitney dan didukung oleh hasil wawancara, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan perspektif yang signifikan antara laki-laki dan perempuan terhadap dampak pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta–Bawen berdasarkan lima dimensi kebutuhan dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan *Social Role Theory*, yang menduga adanya perbedaan perspektif akibat perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan, tidak terbukti. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengadaan tanah di Kalurahan Margokaton, dampak pembangunan lebih dipersepsikan sebagai pengalaman yang dirasakan bersama oleh seluruh masyarakat sehingga perbedaan peran sosial tidak menghasilkan perbedaan perspektif yang signifikan.
2. Bentuk perubahan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat akibat pengadaan tanah paling banyak terjadi pada kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman, seperti munculnya debu, kebisingan, gangguan kesehatan, perubahan akses jalan, kerusakan jalan, dan terganggunya sistem irigasi. Sementara itu, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri relatif tidak mengalami perubahan yang berarti karena hubungan sosial masyarakat tetap terjaga, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, serta mampu beradaptasi dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi lebih menunjukkan adanya dampak terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara umum daripada adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan berdasarkan perspektif gender.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Pelaksana Pengadaan Tanah

Pemerintah dan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tanah serta pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen diharapkan lebih memperhatikan penanganan dampak yang dirasakan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan gangguan debu, kebisingan, kerusakan akses jalan, dan sistem irigasi. Penanganan yang cepat dan berkelanjutan diharapkan dapat meminimalkan dampak pembangunan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Kalurahan Margokaton

Pemerintah Kalurahan Margokaton diharapkan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pihak pelaksana pembangunan agar setiap keluhan maupun aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara efektif. Selain itu, pemerintah kalurahan perlu terus mendampingi masyarakat dalam proses penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi akibat pembangunan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian perspektif gender pada pengadaan tanah dengan mempertimbangkan variabel lain, seperti usia, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, maupun tingkat keterdampakan masyarakat. Selain itu, penelitian dapat dilakukan pada lokasi atau proyek pembangunan yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perspektif gender terhadap dampak pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Taupiqqurrahman. (2023). *Problematika Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Melalui Konsinyasi Pengadilan Negeri*. 17(6), 4037–4048.
- Agarwal, B. (1994). *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge University Press (CUP).
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3 ed.). SAGE Publications.
- Elmhirst, R. (2011). Introducing new feminist political ecologies. *Geoforum*, 42(2), 129–132. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.01.006>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- H. eagly, A. (1987). *Sex Differences in Social Behavior: A Social-Role Interpretation*.
- Levien, M. (2017). *Gender and Land Dispossession*. UN. <https://doi.org/10.18356/886cb6f5-en>
- Lorber, J. (2017). *Paradoxes of Gender*. Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300153446>
- Mahmudah, Z. (2022). *Kebutuhan Abraham Maslow Ditinjau Menurut Al-Quran Surah Quraaisy Ayat 1-4*. 1=66.
- Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 370–396.
- Maslow, A. H. (2017). A theory of human motivation. In *Defining and Classifying Children in Need*. <https://doi.org/10.4324/9781315258324-16>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE Publications.
- Muwahid. (2020). *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Duta Media Pamekasan Madura.
- Nabila, F., Shohibuddin, M., & Soetarto, E. (2021). Perubahan Peran Perempuan Setelah Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Yogyakarta International Airport: Kasus Kalurahan Kebonrejo di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 226–245. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.494>
- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku Organisasi* (B. Molan (ed.); Edisi 10). PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Salcedo-La Viña, C. (2019). *Minding the gender gaps: How legal gaps withhold gender-equitable outcomes in land acquisition, compensation and resettlement*. Book : *Country Frameworks for Development Displacement and Resettlement: Reducing Risk, Building Resilience* (usanna Price & Jane Singer (ed.)). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Sena Wahyu Purwanza et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (A. Munandar (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Shen, Y., Gan, L., & Chen, S. (2024a). Gender impact assessment of land acquisition compensation for sustainable environmental management of Wuxikou Hydropower Projects. *Journal of Geochemical Exploration*, 257, 107357.

- <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2023.107357>
- Shen, Y., Gan, L., & Chen, S. (2024b). Gender Impact Assessment of Land Acquisition Compensation for Sustainable Environmental Management of Wuxikou Hydropower Projects. *Journal of Geochemical Exploration*, 257, 107357. <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2023.107357>
- Sitorus, O., & Limbong, D. (2004). *Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sri Sundari Sasongko. (2009). Konsep dan Teori Gender. In *Bkkbn*. http://lip4.bkkbn.go.id/file.php/1/moddata/forum/9/143/Konsep_dan_Teori_gender.pdf
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). *Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 9, 2721–2731.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2014). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Thi, N. P., Kappas, M., & Wyss, D. (2020). Benefits and Constraints of the Agricultural Land Acquisition for Urbanization for Household Gender Equality in Affected Rural Communes : A Case Study in Huong Thuy Town , Thua Thien Hue Province , Vietnam. *land*, 9(8), 249. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/land9080249>
- Zakie, M. (2013). *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Indonesia dan Malaysia*. Buku Litera.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 (PP No. 23 Tahun 2024) tentang Jalan Tol
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
Peraturan Pemerintah (Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum